



Building mutual motivation and collaborating to overcome the water crisis

Membangun motivasi bersama dan berkolaborasi mengatasi krisis air

Muhammad Nurjaya^{1*}, Anwar¹

¹ Universitas Muslim Maros, Indonesia.

*Correspondence author: nurjaya@umma.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

mutual motivation; collaboration; water crisis; commitment; villages.

How to cite:

Nurjaya, M., Anwar. (2021). *Building mutual motivation and collaborating to overcome the water crisis.* *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(1), 97 – 115.

DOI:

10.31947/etnosia.v6i1.13584

ABSTRACT

Clean water is one of Indonesia's main problems, particularly at the village level. The Pansimas program, facilitated by the central government, has become the primary plan to solve the problem. The central government targets 100% complete filled to the need for clean water throughout the territories. This article deals with the dynamic of the Pansimas program's process to overcome such a problem from the grassroots level. This study was conducted at Borikamase Village, Maros Regency. Data was collected using in-depth interviews with twelve informants from various backgrounds (village head, government officials, partnership community, facilitators, non-governmental organization, public figure, religious leader, and targetted community). The study indicates that it is very difficult to get clean water to be used for their daily consumption in Borikamase – a village which is located in the coastal area of Maros Regency. The limitation of clean water in the village resulted in highly community protection of their village's source of water from outsiders. Water sources, therefore, locally termed as *bulaeng je'ne* (golden water) which means that the source of clean water is considered as something that is highly value. However, it is difficult to overcome the crisis of clean water in the village because of the lack of mutual motivation among the targetter community and between the targetted community and the government. This mutual motivation consists of mutual trust, mutual understanding, mutual recognition and commitment. Therefore, in order to solve the crisis of clean water, the existing collaboration needs to be strengthened among the people involved in the program.

1. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008 meluncurkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang di singkat dengan Pansimas. Program

ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia berkomitmen pada tahun 2019 target capaian akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.

Program Pamsimas menjadi program penyediaan air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi program bersama dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan. Pamsimas telah menjadi salah satu program andalan nasional (pemerintah pusat dan daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dll.) dalam proses kolaborasi lebih memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan publik (Putnam 1993:15). Pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun (Nurjaya, 2020:157).

Praktek manajemen kolaborasi sektor publik yang terjadi secara konseptual biasanya dimulai karena tuntutan rencana strategik sebuah daerah (Bachtiar 2016:232). Aktifitas pemerintahan dalam perspektif *governance*, cenderung mengedepankan kesinergian kepentingan antar domain, yakni pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengurus urusan sosial, ekonomi dan politik suatu negara, melalui struktur dan nilai-nilai yang mencerminkan kepentingan ketiga entitas (Donahue dan Zeckhauser 2011:156). Hubungan sinergis antar pemerintah, masyarakat dan sektor privat dalam penyelesaian masalah publik seperti halnya pemenuhan kebutuhan air minum di Borikamase adalah strategi yang sangat efektif. Seyogyanya, entitas dan kewenangan terdistribusi pada sektor publik, sektor privat dan masyarakat sipil. Ketiga entitas tersebut kemudian secara bersama-sama menjadi subyek dan terlibat langsung merespon masalah-masalah yang akan menjadi kepentingan publik (Emerson dkk. 2012:17). Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan (Islamy, 2017:195).

Keberhasilan pelaksanaan program Pamsimas dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sangat dipengaruhi oleh terbangunnya motivasi bersama antara seluruh pihak baik unsur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta (Emerson dkk. 2012:12). Air Minum adalah kebutuhan publik dan sifatnya sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Menyelesaikan masalah publik harus dengan pendekatan kolaborasi antara seluruh aktor terkait (Ansell dan Gash 2007:8).

Membangun motivasi bersama dalam proses kolaborasi antar aktor memberikan kekuatan serta mampu mengakumulasi potensi yang dimiliki seluruh aktor terhadap penyelesaian agenda publik (Emerson dkk. 2012:15). Dinamika kolaborasi seyogyanya menjadi pembelajaran untuk melahirkan pemahaman yang terintegrasi dalam proses musyawarah (Agranoff dan McGuire 2007:6).

Program Pamsimas di Desa Borikamase memiliki tantangan tersendiri. Pada tahapan ini peran pemimpin lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam membangun proses kolaborasi antar aktor (baca, misalnya, Agranoff dan McGuire 2007:8). Eksistensi

pemimpin lokal, seperti Kepala Desa, memberikan pengaruh besar terhadap dinamika masyarakat. Kepala desa bukan hanya tokoh masyarakat karena dipilih berdasarkan dukungan politik masyarakat, namun berdasarkan aturan dalam program Pamsimas Kepala Desa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pembina pelaku program Pamsimas seperti yang ditetapkan dalam juknis Program Pamsimas, yakni pembinaan dan pemantauan kinerja kelompok keswadayaan masyarakat (KKM) yang direkrut berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa, juga berkaitan dengan dana sharing 10% yang bersumber dari dana desa (Juknis Pamsimas 2018:23). Oleh karena itu, peran strategis Kepala Desa dan tokoh-tokoh lain di tingkat desa sangat berpengaruh besar terhadap lahirnya motivasi bersama. Dengan adanya motivasi bersama, maka akan terbangun solidaritas, mereka saling berbagi pengalaman untuk saling memperkuat identitas dan dedikasi mereka dalam kolaborasi (baca, misalnya, Coleman 1988:20).

Motivasi bersama dapat menjadi indikator awal bekerjanya proses kolaborasi antar aktor dalam pemenuhan kebutuhan air minum di desa Borikamase. Sekiranya di dalam proses kolaborasi masih ada ketidakpuasan yang dirasakan, maka mereka harus tetap membangun kerjasama secara berkelanjutan hingga akhirnya akan menemukan apa yang menjadi harapan mereka (Emerson dan Nabachi 2015:60).

Membangun motivasi bersama sangat penting untuk mendorong munculnya rasa tanggung jawab bersama, akuntabilitas, partisipasi, baik formal maupun informal. Kondisi ini menyebabkan motivasi bersama dapat menjadi energi positif terhadap individu maupun organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum, termasuk di Desa Borikamase.

Sejauh ini sudah cukup banyak literatur yang membahas tentang program Pamsimas dari sisi yang berbeda. Kebanyakan penelitian terkait melihat dari segi evaluasi program itu sendiri (baca, misalnya, Nengsi 2018; Insani dan Satlita 2016; Fitriyani dan Rahdriawan 2015; Kholiq 2014; Astuti dan Rahdriawan 2013). Umumnya temuan-temuan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut sejak awal. Artikel ini lebih menitikberatkan pada segi bagaimana proses membangun motivasi bersama untuk terciptanya kolaborasi antar aktor di dalam mengatasi masalah bersama (krisis air) di Desa Borikamase.

Pembahasan dalam artikel ini dimulai dengan mendiskusikan tentang krisis air dalam kaitan dengan Program Pamsimas di Desa Borikamase. Ini dilanjutkan dengan mendiskusikan tentang bagaimana membangun motivasi bersama untuk berkolaborasi dalam mengatasi krisis air. Bagian akhir mengeksplorasi tentang motivasi bersama untuk penguatan dalam pelaksanaan program Pamsimas demi mengatasi krisis air di Desa Borikamase.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Borikamase Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Desa Borikamase merupakan desa yang terbentuk setelah Kecamatan Maros mengalami pemekaran yang terdiri dari lima dusun. Dalam penilaian Badan Pusat Statistik Desa Borikamase merupakan daerah yang termasuk dalam kategori desa swasembada yakni desa yang dianggap mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan produksi

masyarakat sudah ada yang dapat diperdagangkan/ atau diperjualbelikan sebagai mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat di Desa Borikamase.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri atas masing-masing seorang kepala desa, staf Dinas Pekerjaan Umum, panitia kemitraan, kelompok swadaya masyarakat, dua orang fasilitator (di tingkat kabupaten dan kecamatan); tiga orang tokoh (pemuda, masyarakat, agama), dan tiga orang anggota masyarakat sasaran/pemanfaat program Pamsimas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa) sebagaimana dijabarkan pada **Tabel 1** berikut ini.

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Posisi
1.	Aswing	40 tahun	Laki-laki	Kepala Desa
2.	Hj. Fitriani	45 tahun	Perempuan	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Andi Nurimran	44 tahun	Laki-laki	Panitia Kemitraan
4.	Abd. Rajab	48 tahun	Laki-laki	Fasilitator Kabupaten
5.	Jamaluddin	42 tahun	Laki-laki	Fasilitator Kecamatan
6.	Ashadi	37 tahun	Laki-laki	Kelompok Keswadyaan Masyarakat (KKM)
7.	Bohari	32 tahun	Laki-laki	Tokoh pemuda
8.	H. Ruslan	65 tahun	Laki-laki	Tokoh masyarakat
9.	H. Ahmad	67 tahun	Laki-laki	Tokoh agama
10.	Dg. Sangkala	54 tahun	Laki-laki	Kelompok sasaran/ pemanfaat program
11.	Dg. Syamsiah	46 tahun	Perempuan	Kelompok sasaran/ pemanfaat program
12.	Dg. Aminah	42 tahun	Perempuan	Kelompok sasaran/ pemanfaat program

Observasi dan wawancara merupakan teknik kombinasi dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan topik-topik wawancara mencakup persepsi tentang program Pamsimas, keterlibatan dalam program, harapan terhadap program, masalah yang muncul dalam pelaksanaan, cara mengatasinya, dan komitmen masyarakat dan pelaku program Pamsimas mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat desa dalam membangun kolaborasi pada program Pamsimas.

Proses analisa berlangsung sejak penelitian berlangsung. Namun, setelah proses pengumpulan data selesai, maka semua data yang diperoleh dari wawancara ditranskripkan dan ditelaah bersama dengan catatan hasil observasi. Dari hasil penelaahan diperoleh tema-tema yang meliputi:

Izin penelitian diperoleh dari Pemerintah Provinsi, yang diturunkan ke Pemerintah Kabupaten Maros, dan selanjutnya di tingkat kecamatan, hingga ke tingkat desa untuk melakukan penelitian dalam wilayah administratif Desa Borikamase. Perekrutan informan diawali dengan mendiskusikannya dengan fasilitator Pamsimas di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Melalui mereka, saya memperoleh beberapa nama untuk dijadikan sebagai informan untuk diwawancarai. Sebelum wawancara dilakukan,

prospektif informan dijelaskan tentang topik, tujuan, manfaat dari penelitian yang dilakukan. Jika mereka memberikan persetujuan untuk diwawancarai, maka masing-masing dimintai kesediaan untuk direkam selama wawancara berlangsung. Semua nama informan yang ada dalam artikel ini adalah nama asli dan digunakan atas persetujuan dari informan (*informant consent*).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- **Krisis Air Bersih & Bulaeng Je'ne**

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat di Indonesia. Program ini merupakan program yang dilaksanakan dengan pendekatan kolaborasi baik dengan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha maupun dengan fasilitator yang ada pada program Pamsimas.

Desa Borikamase merupakan bagian dari Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis berada di wilayah pesisir dan sebagian besar berbentuk daratan dengan topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 5.24 km².

Sebagai wilayah yang berada di pesisir, Desa Borikamase memiliki permasalahan yang sangat mendasar, yakni penyediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pada aspek ekonomi aktifitas masyarakat pada umumnya menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan pertanian dengan sebagian besar irigasi teknis. Artinya, air diperlukan bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat (seperti untuk diminum, untuk memasak, mandi, mencuci, dll.), tapi juga digunakan dalam kaitan dengan mata pencaharian mereka. Ironisnya, antara tahun 1960 dan 2012, Desa Borikamase—yang penamaannya didasarkan pada berbagai kebaikan yang menjadi karakter dari lima dusun yang tercakup di dalamnya, sehingga desa ini diibaratkan “kampung yang penuh dengan kasih”—merupakan langganan banjir terbesar di Kabupaten Maros,¹ kini mengalami krisis air.

Untuk mendapatkan air bersih masyarakat mengawalinya dengan melakukan penelusuran wilayah yang berpotensi memiliki sumber/mata air, sebelum akhirnya melakukan pengeboran. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan sumber air dilakukan secara swadaya, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk menggali sumur, meskipun pemerintah desa terkadang juga terlibat terutama dalam kaitan dengan penentuan titik-titik potensial sumber/mata air. Meskipun ada sumber/mata air yang telah ditemukan, namun ini masih sangat terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh di Desa Borikamase. Penggalan sumur air permukaan—yang merupakan sumber air yang bisa diperoleh melalui penggalian sumur yang dilakukan di areal persawahan atau daratan yang dianggap berpotensi memiliki sumber air—jikapun ditemukan mata air, airnya asin atau payau yang tidak sehat dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hingga saat ini program Pamsimas

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Borikamase,_Maros_Baru,_Maros, diakses tanggal 16 Juni 2021.

terus melakukan survei lapangan di berbagai tempat yang ada di desa Borikamase dan sekitarnya untuk mendapatkan sumber air yang baru.

Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, terutama di musim kemarau, masyarakat harus membeli air dan ini menjadi pengeluaran tambahan dengan membeli di pedagang air atau membeli melalui mobil tangki dari PDAM Maros dengan harga Rp270.000,- tiap mobil tangki PDAM dan rata-rata masyarakat menggunakan 3-4 tangki dalam sebulan. Ini sangat memberatkan karena mereka rata-rata masuk dalam kategori penduduk pra-sejahtera dengan pendapatan yang tidak menentu, sehingga mereka "dimiskinkan" oleh krisis air di Desa Borikamase.

Sulitnya memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Borikamase diekspresikan oleh masyarakat dengan kalimat: "lebih baik menyerahkan ikan bandeng satu ekor dari pada memberi air satu timba". Bandeng adalah ikan andalan masyarakat dan dari berbagai jenis ikan yang dikonsumsi sehari-hari, bandeng adalah jenis ikan yang paling *common* dikonsumsi. Oleh karenanya, meskipun bandeng bukan merupakan ikan khas orang Bugis-Makassar, masakan ikan paling sering ditemui dalam menu orang Bugis-Makassar, termasuk masyarakat di Desa Borikamase. Oleh karenanya, seandainya bagaimanapun seekor bandeng, air tetap menjadi prioritas.

Saat ini, Desa Borikamase memiliki sumber mata air satu-satunya (lihat **Gambar 1**) yang dipergunakan oleh masyarakat meskipun belum seluruhnya masyarakat di desa tersebut memperoleh pelayanan air yang disebabkan oleh debit air yang terbatas, apatah lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari desa lain yang berbatasan dengan wilayah Desa Borikamase.

Begitu pentingnya sumber air satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Borikamase, mereka memperlakukan air sebagai emas dan menyebutnya dengan istilah "*bulaeng je'ne*" (air emas). Sebagaimana emas yang bernilai ekonomi tinggi dan nilainya selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga senantiasa dijaga keberadaannya, air juga diperlakukan demikian. Mereka menjaga efisiensi penggunaannya, agar senantiasa ada untuk digunakan oleh masyarakat.



Gambar 1. Sumber/mata air dan penampungannya

Dalam konteks ini, ada kesepakatan di masyarakat bahwa karena air ini sangat penting dan terbatas, sehingga masyarakat bersama-sama memroteksinya dari masyarakat di luar Desa Borikamase yang mau mengambilnya. Hal ini dilakukan agar air dari sumber air tersebut akan selalu ada untuk kebutuhan mereka. Untuk mengefektifkan kebutuhan air, maka untuk mandi mereka sangat membatasi penggunaannya agar air yang mereka miliki dapat memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya untuk memasak, minum, mencuci, dll. Bahkan setelah buang air besar pun mereka menjadikan air empang/tambak sebagai alternatif untuk menyebok. Meskipun tidak ada kesepakatan bersama secara spesifik tentang berapa banyak air yang bisa digunakan untuk mandi bagi setiap orang, mereka melakukan perkiraan sendiri seberapa banyak yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut, semakin tidak efektif penggunaannya, semakin berpotensi untuk membeli air jika persediaan telah habis. Menampung air di musim hujan adalah alternatif untuk mendapatkan air yang digunakan untuk berbagai tujuan.

Di tingkat individu dan keluarga, ini menunjukkan bahwa kesadaran individu sangat memengaruhi berapa banyak air yang dihabiskan dalam suatu keluarga dan berapa besar tambahan pengeluaran yang mereka harus keluarkan untuk membeli jika persediaan air telah habis. Di tingkat komunal, sumber air yang ada dijaga sedemikian rupa agar air digunakan seefektif mungkin. Sumber air juga dipagari dari gangguan ternak dan dari orang luar yang berpotensi mengambil air dari sumber air tersebut. Sumber air dijaga seperti emas yang berharga, sebagai *bulaeng je'ne'* (air emas).

- **Bersama & Kolaborasi**

Jika merujuk pada teori Emerson dan Nabachi (2015:63), maka motivasi bersama akan membangun solidaritas, mereka saling berbagi pengalaman untuk saling memperkuat dalam proses kolaborasi. Upaya pemenuhan air minum yang layak merupakan program pemerintah melalui Program Pamsimas dengan target bahwa pada tahun 2019 semua kebutuhan air di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi. Namun, hingga saat ini target pemerintah pusat sesuai dengan RPJMN 2015-2019 tidak mampu direalisasikan, termasuk di Desa Borikamase. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk mewujudkannya.

Membangun motivasi bersama dalam aktifitas kolaborasi antar aktor pada program Pamsimas di Desa Borikamase merupakan aspek yang sangat penting karena ini akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan program Pamsimas secara berkelanjutan. Dalam membangun motivasi bersama diantara aktor pada pelaksanaan program Pamsimas di Desa Borikamase, ada beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dari masyarakat, yaitu: apa alasan terlibat dalam proses kolaborasi, apa harapan masyarakat dalam proses kolaborasi, bagaimana masyarakat dapat mempertahankan motivasi dalam proses kolaborasi? Dalam kaitan dengan ini, Pak Jamaluddin yang seorang fasilitator kecamatan, misalnya, mengemukakan sebagai berikut:

Masyarakat pada prinsipnya belum memahami secara mendalam mengapa mereka harus terlibat dalam program Pamsimas mereka menganggap bahwa pelaku yang telah diangkat oleh kepala desa lewat musyawarah desa sudah cukup mewakili kepentingan mereka pada pelaksanaan program Pamsimas di desa mereka. (Jamaluddin, 42 tahun fasilitator kecamatan).

Ini merefleksikan bahwa kepesimisan masyarakat dan merasa keberadaan dan peran mereka dalam kegiatan pembangunan di desa tidak begitu penting. Ini karena, selama ini semua kegiatan di desa bisa berjalan meskipun tidak banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musyawarah desa yang dilakukan pemerintah desa.

Padahal untuk membangun motivasi bersama pada pelaksanaan program Pamsimas di Desa Borikamase, ini pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama dan berkesinambungan oleh seluruh aktor yang terlibat. Keterlibatan mereka penting untuk mendapatkan manfaat dari keputusan bersama yang diambil.

Dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam Program Pamsimas, proses transformasi pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan program Pamsimas menjadi terhambat. Meskipun perbedaan terkadang ditemukan dalam proses kolaborasi namun dengan adanya motivasi bersama, maka akan terbangun solidaritas, mereka saling berbagi pengalaman untuk saling memperkuat identitas dan dedikasi mereka dalam

apa yang diistilahkan oleh Emerson dkk. (2012:15) sebagai *an integrative framework for collaborative governance* (kerangka integratif untuk tata kelola kolaboratif).

Dalam kaitan dengan ini, Dg. Syamsiah (46 tahun), salah seorang sasaran/penerima manfaat program, menyarankan agar dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat hendaknya tidak dilakukan dalam forum-forum resmi, tapi dilakukan ketika mereka sedang beraktivitas sehari-hari karena mereka merasa lebih rileks. Umumnya, jika mereka diundang pada forum-forum resmi, maka mereka datang hanya karena dipanggil pak desa, bukan karena mereka memang berminat untuk mengetahui apa yang akan disampaikan. Jika mereka tidak datang, maka hal tersebut memiliki konsekuensi dalam kaitan dengan apapun urusan dengan kantor desa, seperti untuk urusan kartu identitas (KTP), kartu keluarga (KK), izin menikah, dll.

Lalu, apa harapan masyarakat dalam proses kolaborasi terkait Program Pamsimas? Bohari, yang merupakan Tokoh Pemuda Desa Borikamase, menyatakan sebagai berikut:

Harapan besar masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir agar pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dapat diselesaikan melalui program Pamsimas. Masalah air bersih dan sanitasi merupakan masalah yang sangat krusial ini sudah merupakan masalah klasik yang terjadi setiap tahun. Dengan pendekatan kolaborasi maka besar harapan masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat (Bohari, 32 tahun, Tokoh Pemuda Desa Borikamase).

Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Desa Borikamase yang menjelaskan, bahwa:

Pendekatan kolaborasi lebih memberikan harapan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebab kegiatan ini akan melibatkan banyak kekuatan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari unsur masyarakat. Ini sangat berbeda dengan kegiatan yang bersifat "keproyekan" yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dikerjakan atau melibatkan pemerintah dan kontraktor dimana orientasi kontraktor selaku pelaksana kegiatan di lapangan lebih mengutamakan keuntungan secara sepihak dan mengabaikan asas manfaat untuk masyarakat secara berkelanjutan (Aswing, 40 tahun, Kepala Desa).

Seorang tokoh masyarakat, Pak Haji Ruslan, mengungkapkan bahwa:

Proses kolaborasi antar pelaku dalam program Pamsimas memberikan harapan yang lebih besar namun ini harus tetap dikawal dengan baik terutama pembinaan oleh pihak pemerintah terutama pemerintah desa dan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator. Pada prinsipnya komposisi pelaku dalam program yang merupakan gabungan antara unsur pemerintah dan masyarakat merupakan strategi yang tepat agar masyarakat juga mendapat kesempatan untuk mengetahui apa dan bagaimana menyelesaikan masalah terutama yang berkaitan dengan penyediaan air minum dan sanitasi yang sehat (Haji Ruslan, 65 tahun, tokoh masyarakat).

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan harapan besar masyarakat melalui pendekatan kolaborasi dalam mengatasi krisis air di desa mereka. Harapan tersebut menjadi sumber lahirnya motivasi bersama untuk melakukan aktifitas dalam pelaksanaan program Pamsimas. Namun terkadang motivasi bersama sangat labil.

Bagaimana masyarakat dapat mempertahankan motivasi dalam proses kolaborasi? Membangun motivasi bersama pada pelaksanaan program Pamsimas di Desa Borikamase pada prinsipnya harus dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi sebagai penerima manfaat dalam program tersebut. Meskipun, menurut Emerson dkk. (2012:18), perbedaan terkadang ditemukan

dalam proses kolaborasi. Namun demikian, motivasi bersama membangun solidaritas, saling berbagi pengalaman untuk saling memperkuat identitas dan dedikasi mereka dalam kerangka rezim tata kelola kolaboratif (*collaborative governance regime*, CGR). Dalam kaitan dengan ini, Pak Andi Nur Imran menyatakan, bahwa:

Motivasi bersama untuk berkolaborasi dalam program Pamsimas sangat dipengaruhi oleh konsistensi seluruh pelaku terhadap tujuan awal mereka dilibatkan dalam kegiatan program Pamsimas. Ini karena di awal mereka terkadang sangat termotivasi, tapi dalam perjalanannya masyarakat dan pelaku program Pamsimas lainnya menurun motivasinya yang disebabkan adanya kepentingan lain atau kepentingan pribadi yang ingin dicapai oleh oknum yang terlibat dalam program Pamsimas (Andi Nur Imran, 44 tahun, panitia kemitraan).

Jika merujuk pada kutipan di atas, maka kepentingan pribadi menjadi penyebab labilnya motivasi bersama yang telah terbangun dan mengganggu keharmonisan antar aktor yang terlibat. Padahal untuk menjaga konsistensi motivasi bersama, maka harmonisasi menjadi aspek yang sangat signifikan dalam berkolaborasi, sebagaimana yang ditekankan oleh Pak Rajab berikut ini:

Bahwa menjaga konsistensi motivasi bersama dalam aktifitas kolaborasi pada program Pamsimas adalah bagaimana membangun harmonisasi hubungan antar pelaku program Pamsimas, baik yang berasal dari unsur pemerintah maupun dari unsur masyarakat, sehingga bisa saling memotivasi antara satu dengan yang lain (Abd. Rajab, 48 tahun fasilitator Pamsimas Kabupaten Maros).

Ini dipertegas oleh Pak Jamaluddin yang menyatakan, bahwa:

Kualitas interaksi antar pelaku adalah kunci untuk menjaga motivasi bersama dalam pelaksanaan kegiatan program Pamsimas. Keaktifan masyarakat dan pelaku lain yang berasal dari unsur pemerintah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka menjaga kualitas interaksi mereka (Jamaluddin, 42 tahun, fasilitator kecamatan).

Ini menunjukkan bahwa proses membangun motivasi bersama terhadap seluruh aktor terutama masyarakat dalam suatu daerah membutuhkan konsistensi dan pendekatan yang lebih humanis terutama dari pemimpin lokal seperti kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur pemerintah yang ada di tingkat kecamatan dan kabupaten, demikian juga di desa Borikamase.

- **Motivasi Bersama dan Penguatan Diri**

Berkaitan dengan proses kolaborasi dalam membangun motivasi bersama, Emerson dkk. (2012:13) menekankan pentingnya motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen yang saling terkait satu sama lain, yakni: kepercayaan bersama (*mutual trust*), pemahaman bersama (*mutual understanding*), pengakuan internal (*internal legitimation*), dan komitmen (*commitment*), sebagaimana yang akan dibahas berikut ini:

Kepercayaan bersama

Kepercayaan bersama adalah elemen pertama dalam melahirkan motivasi bersama dalam proses kolaborasi. Program Pamsimas di Desa Borikamase adalah program yang dikolaborasikan di antara berbagai unsur dalam suatu wilayah, yakni masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari mereka yang berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda. Misalnya, organisasi keagamaan (Majelis Taklim, Pengurus Mesjid, dll.), organisasi kepemudaan (KNPI, Karang Taruna), organisasi profesi

(Kelompok Petani, Nelayan dll), dan unsur pemerintah yang mencakup mereka yang berasal dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten sampai tingkat desa, serta berbagai organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten.

Berkaitan dengan proses membangun kepercayaan bersama, maka ada sejumlah hal yang harus dijawab, utamanya pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menjadi inisiator membangun kepercayaan bersama di antara para aktor dalam pelaksanaan program Pamsimas di Desa Borikamase, bagaimana melahirkan dan mempertahankan kepercayaan bersama, apa manfaat membangun kepercayaan bersama dalam kegiatan tersebut. Dalam kaitan dengan ini, Dg. Sangkala, sebagai bagian dari kelompok sasaran, mengungkapkan sebagai berikut:

Membangun kepercayaan seharusnya diinisiasi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Namun, yang terkadang terjadi saat ini adalah orang yang dulu ditokohkan oleh masyarakat mulai kehilangan pengaruh dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tercederai oleh pemimpin lokal dengan kepentingan pribadi dan sangat pragmatis (Dg. Sangkala, 54 tahun, kelompok sasaran/pemanfaat).

Ini mengindikasikan bahwa wibawa pemimpin lokal sangat terpengaruh oleh siapa pemimpin yang sedang berkuasa dan masyarakat cenderung untuk “menjadi *follower*” dari siapa yang sedang berkuasa. Dalam banyak kasus, jika tidak menjadi *follower* penguasa, maka urusan administratif biasanya akan dipersulit oleh pemerintah desa, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Namun, membangun kepercayaan tak semudah membalikkan telapak tangan, terutama jika seseorang pernah menyalahgunakan kepercayaan, sehingga ia (tokoh masyarakat) kehilangan kepercayaan, misalnya, disebabkan oleh kepentingan politik (Pileg, Pilkada dll.) praktek politik pragmatis dengan politik uang (*money politic*) yang terkadang proses distribusinya tidak adil menurut anggapan masyarakat atau biasa juga disebabkan karena adanya pembagiaan bantuan kepada masyarakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari pihak lain yang diskriminatif. Perlakuan seperti ini biasanya melekat di hati masyarakat dan sulit dilupakan dalam waktu singkat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rajab, seorang fasilitator Pamsimas Kabupaten Maros, yang menyatakan bahwa:

Membangun kepercayaan bersama dalam aktifitas kolaborasi membutuhkan waktu yang lama apalagi jika sebelumnya telah terjadi hal yang menyebabkan kehilangan kepercayaan, terutama pada pemimpin lokal di beberapa wilayah desa yang menjadi sasaran program Pamsimas. Di tingkat desa ditemukan adanya krisis kepercayaan terhadap pelaku-pelaku program Pamsimas (Abd. Rajab, 48 tahun, fasilitator kabupaten).

Krisis kepercayaan pada pelaku program Pamsimas di tingkat desa sering terjadi disebabkan karena proses pemilihan pelaku program terkadang lebih banyak diintervensi oleh Kepala Desa tanpa melihat kelayakan atau kemampuan kerja orang yang diusulkan. Jika kepercayaan bersama tidak tumbuh dan tertanam dalam aktifitas kolaborasi, ini menyebabkan para pelaku kehilangan energi positif dan saling curiga mencurigai pada setiap aktifitas. Ashadi, anggota kelompok keswadayaan masyarakat (KKM), menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa:

Membangun kepercayaan bersama dalam kegiatan kolaborasi dalam program Pamsimas masih sangat sulit diwujudkan secara maksimal. Ini dikarenakan keaktifan/partisipasi masyarakat dalam kegiatan masih terbatas, pada hal keaktifan para pelaku program tidak hanya akan melahirkan kepercayaan bersama, tapi juga melahirkan pemahaman dan komitmen terhadap kegiatan yang dikolaborasikan (Ashadi, 37 tahun, kelompok keswadayaan masyarakat).

Kepercayaan bersama bukan hanya diupayakan dalam proses kolaborasi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan bersama agar kolaborasi dapat berkelanjutan, upaya tersebut telah dilakukan oleh fasilitator program Pamsimas mulai dari tingkat kabupaten sampai fasilitator di tingkat desa. Ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh H. Fitriani (45 tahun), pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros, bahwa mempertahankan kepercayaan bersama adalah kunci keberhasilan dalam melakukan aktifitas kolaborasi pada program Pamsimas serta intensitas dalam mengikuti seluruh agenda program agar pemahaman terhadap substansi masalah yang dihadapi dapat dimengerti dan disadari secara baik oleh masyarakat.

Pemahaman bersama

Pemahaman bersama dimaksudkan untuk membuat sesama pemangku kepentingan saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, bahkan ketika pemangku kepentingan tersebut tidak sependapat. Pembentukan pemahaman bersama seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

Pemahaman bersama dapat diwujudkan jika masyarakat sebagai pelaku aktif mengikuti segala aktifitas kolaborasi dalam pelaksanaan agenda program Pamsimas, sehingga mereka memahami aturan yang ada pada program Pamsimas serta etika dalam membangun kolaborasi. Pertemuan yang dilakukan bukan hanya melahirkan pengertian terhadap agenda dan masalah yang dibahas, tetapi juga menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif.

Distribusi informasi berkaitan dengan mekanisme, aturan, nilai dan berbagai hal tentang program Pamsimas di Desa Borikamase belum berjalan dengan baik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan masyarakat dalam agenda kegiatan yang relatif masih rendah apalagi di daerah pesisir seperti Desa Borikamase yang telah terkontaminasi dengan gaya hidup orang kota, seperti yang disampaikan oleh Pak Ashadi, ketua kelompok keswadayaan masyarakat (KKM) Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, berikut ini:

Masyarakat sulit diberikan pemahaman secara luas karena mereka kurang aktif mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh pelaku program Pamsimas. Padahal program Pamsimas adalah program pemberdayaan yang menuntut partisipasi masyarakat agar mereka bukan hanya mendapatkan manfaat dari kegiatan teknis yang dilakukan oleh program. Akan tetapi bagaimana keterlibatan dalam proses kegiatan masyarakat mendapat pemahaman tentang apa masalah yang substantif yang mereka hadapi, bagaimana menyelesaikan dan pihak-pihak mana saja yang harus terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama yang berkaitan dengan masalah air minum dan sanitasi di lingkungan mereka (Ashadi, 37 tahun, KKM).

Kekurangpercayaan (*lack of trust*) masyarakat terhadap pelaku program yang direkomendasikan di desa yang terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat menyebabkan sulitnya membangun pemahaman bersama. Apalagi jika desa tersebut baru saja melakukan pemilihan Kepala Desa. Pak Jamaluddin menanggapi hal ini dengan menyatakan, bahwa:

Efek pemilihan kepala desa sangat berpengaruh terhadap komposisi pelaku program di desa meskipun terkadang sudah ada yang disetujui oleh masyarakat. Tapi setelah Kepala Desa baru terpilih, maka pelaku program Pamsimas di tingkat desa cenderung mengalami pergantian apalagi jika pelaku sebelumnya bukan tim atau pendukung pak desa terpilih, hal ini juga sangat mempengaruhi kepercayaan dan motivasi untuk membangun pemahaman bersama dalam pelaksanaan program Pamsimas. (Jamaluddin, 42 tahun, fasilitator kecamatan).

Masalah lainnya adalah kepala desa memiliki kecenderungan untuk menempatkan dan melibatkan warga dalam kegiatan program pada orang-orang yang memberikan dukungan pada saat pemilihan Kepala Desa sebelumnya tanpa melihat aspek kompetensi dalam melaksanakan agenda kegiatan, implikasi politik lokal/desa memberi pengaruh terhadap dinamika masyarakat untuk terlibat pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Ini menunjukkan signifikannya aspek politik (baca: Pilkada) dalam pelaksanaan Program Pamsimas. Ini karena keberlangsungan program sangat bergantung pada siapa pemimpinnya, sehingga “ganti pemimpin, ganti kebijakan” yang sekaligus menunjukkan bahwa sistem dalam pelaksanaan Program Pamsimas belum terbangun secara baik.

Pengakuan Internal

Pengakuan internal merupakan pengakuan yang berasal dari internal yang terlibat dalam kolaborasi. Adanya rasa saling percaya dapat melahirkan pengakuan secara internal di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Setiap peserta memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga menjadi alasan bagi mereka kenapa mereka harus berkolaborasi (Bryson dkk. 2006). Mereka yang berkolaborasi harus menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang akan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan.

Pengakuan secara internal dalam proses kolaborasi pada Program Pamsimas di Desa Borikamse ditanggapi oleh Pak Andi Nur Imran, yang merupakan bagian dari Panitia Kemitraan Program Pamsimas Kabupaten Maros, bahwa:

Pendekatan yang paling efektif dilakukan untuk membangun motivasi bersama, kepercayaan, pemahaman dan pengakuan secara internal adalah dengan pendekatan interpersonal. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih leluasa untuk mengungkapkan segala keluhan, masukan, harapan dan juga kepentingan mereka yang terkadang berbeda dengan pihak lain. Dalam upaya menumbuhkan pengakuan secara internal, ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan harus memperlihatkan progres, yakni dari hari ke hari semakin meningkat (Andi Nur Imran, 44 tahun Panitia Kemitraan Pamsimas Kabupaten Maros)

Apa yang diungkapkan oleh Pak Andi Nur Imran di atas dibenarkan oleh H.Fitri, pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi tentang air bersih di Kabupaten Maros, bahwa:

Pengakuan secara internal pada seluruh pelaku program dan masyarakat butuh proses. Mereka harus saling mengerti bagaimana kondisi mereka tentang potensi dan masalah mereka masing-masing di dalam aktifitas program Pamsimas di lapangan yang nampaknya belum terwujud secara maksimal (H. Fitri, 45 tahun, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Maros).

Ini menunjukkan bahwa pengakuan secara internal dalam kelompok masyarakat yang berkolaborasi dalam pelaksanaan Program Pamsimas di Desa Borikamase belum terwujud secara maksimal. Ini karena kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat masih rendah. Padahal proses yang dilakukan secara bersama dalam seluruh tahapan program menjadi media untuk melahirkan pengakuan secara internal. Mereka akan saling memperlihatkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka dalam melakukan pekerjaan, dan kolaborasi ini menutupi kekurangan di antara mereka dan kelebihan masing-masing menjadi penguat dalam berkolaborasi.

Potensi dan masalah dalam uraian di atas berkaitan dengan kondisi internal masyarakat yakni kekurangan dan kelebihan yang ada pada mereka berkaitan dengan tingkat pendapatan yang relatif masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat pendidikan mereka. Namun, hal tersebut dapat diperbaiki dengan meningkatkan motivasi untuk terlibat, bekerja keras, dan lebih membuka diri untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan benar tentang bagaimana menyelesaikan berbagai masalah mereka, yang dalam konteks ini berkaitan dengan bagaimana mengatasi keterbatasan air bersih dan sanitasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Namun, semua itu menjadi sulit untuk diwujudkan jika tidak ada komitmen bersama di antara mereka.

Komitmen bersama

Dengan pengembangan dan konfirmasi tentang pengakuan, maka ini melahirkan komitmen pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi. Komitmen ini merupakan elemen keempat dari motivasi bersama, dimana masyarakat memungkinkan melewati batas organisasi, peraturan dan batas-batas sektoral yang sebelumnya memisahkan hubungan dan interaksi mereka dan sekarang telah melahirkan komitmen bersama (Ansell dan Gash 2007: 10).

Berkaitan dengan komitmen, seluruh aktor dalam proses kolaborasi pada pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Maros masih menjadi tantangan untuk mendukung ketercapaian tujuan program Pamsimas. Misalnya, masyarakat diminta untuk berkomitmen dalam berkontribusi minimal 20% dari total biaya rencana kegiatan masyarakat (RKM). Ini terdiri atas 4% dalam bentuk tunai (*in cash*), yakni swadaya masyarakat dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk operasional kelompok masyarakat dan 16% dalam bentuk natura (*in kind*), yakni swadaya masyarakat dalam bentuk materi, tenaga, dan gotong royong. Ini merupakan dana pendukung bagi pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat, dan dituangkan dalam RKM sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Juknis Pamsimas sebagai syarat untuk mendapatkan dana program Pamsimas. Dalam kaitan dengan ini, komitmen pemerintah terutama pemerintah desa dan komitmen fasilitator selaku pendamping masyarakat berperan memberikan pembimbingan dan motivasi terhadap masyarakat serta mengawal agenda program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemeliharaan

Komitmen masyarakat terhadap syarat *in-kind* dan *in-cash* belum berjalan sesuai dengan juknis program Pamsimas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ashadi berikut ini:

*Masyarakat telah ingkar janji terhadap program sebagaimana yang telah disampaikan pada saat sosialisasi sebelum mendapatkan alokasi dana dari program Pamsimas bahwa mereka bersedia bergotong royong untuk memenuhi syarat untuk mendapat alokasi dana dari program Pamsimas. Tapi, pada kenyataannya mereka menghindar dengan alasan jadwal gotong royong bersamaan dengan jadwal bekerja mereka, sehingga terkadang pelaku program Pamsimas yang ada di tingkat desa yang harus mengerjakan pekerjaan di lapangan, juga termasuk dana tunai sebesar 4% yang diistilahkan di program Pamsimas dengan *in-cash*. Untuk menutupi itu, maka pemerintah desa biasanya berinisiatif sementara menggunakan dana desa agar dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui APBN dapat dicairkan (Ashadi, 37 tahun, KKM).*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bohari, tokoh pemuda Desa Borikamase sebagai berikut:

*Terkadang kepala desa memberikan dana talangan untuk memenuhi syarat dana *In-cash* sebesar 4% agar tahapan kegiatan program Pamsimas dapat berjalan proses penggantian dana talangan tersebut biasanya diusahakan oleh warga setelah kegiatan program sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misalnya air minum sudah bisa dinikmati oleh warga atau sudah ada perbaikan sanitasi oleh program Pamsimas. (Bohari, 32 tahun, Tokoh Pemuda).*

Hasil pengamatan mendukung pernyataan di atas, bahwa masyarakat tidak berkomitmen terhadap syarat *in-cash*, meskipun hal tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk Momenandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah desa dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum tingkat Kabupaten. Dana tunai ini (*in cash*) sengaja dibebankan kepada masyarakat yang mendapat alokasi anggaran Program Pamsimas agar kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut.

Dukungan komitmen bukan hanya dibutuhkan dari unsur masyarakat, tapi seluruh pihak yang terkait dengan program Pamsimas. Namun, menurut Pak Rajab:

Tantangan yang dihadapi oleh program Pamsimas tentang komitmen pemerintah terutama pemerintah desa berkaitan dengan rekrutmen pelaku program Pamsimas di tingkat desa yang cenderung melihat pada aspek kedekatan dengan kepala desa, sehingga ini cenderung mengabaikan sumber daya manusia yang lain yang memiliki kualitas yang lebih baik. Ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tahapan program Pamsimas di desa (Abd. Rajab, 48 tahun, fasilitator Pamsimas Kabupaten).

Intervensi pemerintah desa terhadap pelaksanaan program Pamsimas di desa sangat memberi pengaruh yang sangat kuat, karena Kepala Desa sebagai pembina pada program Pamsimas juga sangat menentukan kelancaran pencairan dana *sharing* sebesar 10% dari total alokasi dana program Pamsimas yang masuk ke desa, sehingga komposisi pelaku program Pamsimas di desa sangat ditentukan rekomendasi Kepala Desa.

Hal lain yang berkaitan dengan komitmen pelaku dalam pelaksanaan Program Pamsimas, yakni eksistensi fasilitator yang direkrut oleh program Pamsimas yang tidak berkomitmen penuh, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program Pamsimas masih sulit diwujudkan secara maksimal. Untuk memastikan pelaksanaan Program Pamsimas dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka pemerintah melalui

kementrian terkait melakukan perekrutan fasilitator mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa guna memberikan pendampingan kepada masyarakat agar transfer pengetahuan dan membangun serta meningkatkan pemahaman masyarakat dapat diwujudkan.

Namun faktanya peran fasilitator, khusus fasilitator di tingkat desa, belum melakukan pendampingan secara maksimal terhadap pelaksanaan agenda Program Pamsimas di Desa Borikamase. Ini dikeluhkan oleh berbagai pihak. Misalnya, Pak Ashadi mengungkapkan kekesalannya berikut ini:

Keberadaan fasilitator sangat menentukan keberhasilan agenda program Pamsimas namun terkadang ditemukan adanya fasilitator yang tidak total memberikan pendampingan kepada masyarakat sehingga terkadang dijumpai beberapa kendala di lapangan misalnya pembinaan kelembagaan KPSPAM penentuan titik sumber air yang layak atau bisa berkelanjutan, memfasilitasi pertemuan/musyawarah di desa agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih kongkrit tentang program Pamsimas (Ashadi, 37 tahun, kelompok keswadayaan masyarakat)

Kutipan di atas mengindikasikan bagaimana masyarakat menaruh harapan besar terhadap komitmen fasilitator untuk memfasilitasi masyarakat, terutama jika ada kendala yang dihadapi dalam kaitan dengan pelaksanaan Program Pamsimas.

Komitmen juga harus terdistribusi pada seluruh unsur pelaku dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan program Pamsimas karena komitmen merupakan modal sosial dalam membangun motivasi bersama. Membangun komitmen dalam program Pamsimas merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan memiliki rentetan kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan pengakuan internal dalam proses kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Maros khususnya di Desa Brikamase. Keempat elemen ini (kepercayaan bersama, pemahaman bersama, pengakuan internal, dan komitmen) ini belum berjalan dengan baik karena masyarakat dan pelaku lain yang terkait dengan pelaksanaan agenda program belum menjalankan perannya secara maksimal.

4. Penutup

Membangun motivasi bersama dalam proses banyak tantangan. Pada tahapan ini peran pemimpin lokal di tingkat desa menjadi motor penggerak dalam membangun motivasi warga. Berkaitan dengan proses kolaborasi antar aktor dalam membangun motivasi bersama pada program Pamsimas di Desa Borikamase yang meliputi 4 (empat) unsur, yakni: (1) Kepercayaan bersama, bahwa kepercayaan bersama belum tumbuh dan tertanam secara baik dalam aktifitas kolaborasi antar aktor pada Program Pamsimas di Desa Borikamase, hal ini menyebabkan para pelaku kehilangan energi positif dan cenderung saling curiga mencurigai dalam menjalankan aktifitas program (2) Pemahaman bersama pada Program Pamsimas masih sulit diwujudkan sesuai dengan harapan program. Distribusi informasi berkaitan dengan mekanisme, aturan, nilai dan berbagai hal tentang Program Pamsimas di Desa Borikamase belum berjalan dengan baik. Ini karena keaktifan masyarakat dalam agenda kegiatan relatif masih rendah; (3) Pengakuan secara internal dalam proses kolaborasi antar aktor pada program Pamsimas di Desa Borikamase masih belum maksimal dan memerlukan pendekatan secara

interpersonal pada seluruh unsur baik pemerintah, fasilitator maupun masyarakat secara umum; dan (4) Komitmen masih menjadi tantangan atau belum mendapat dukungan secara maksimal dalam mencapai tujuan Program Pamsimas di Desa Borikamase Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Masyarakat dan unsur pemerintah di tingkat desa Borikamase harus menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan air minum hanya dapat diwujudkan dengan proses kolaborasi antara seluruh pihak yang ada baik dari unsur pemerintah desa, masyarakat desa Borikamase dan fasilitator Pamsimas dengan cara membangun motivasi bersama yang diawali dengan membangun kepercayaan bersama, pemahaman bersama, pengakuan internal dan komitmen bersama.

Terbangunnya motivasi bersama di antara seluruh pihak akan menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan segala potensi yang dimiliki yang dapat diarahkan pada proses kolaborasi. Seyogyanya pemerintah memberikan contoh bagaimana menciptakan kerjasama dan sinergitas pada seluruh pihak yang terkait dengan pemenuhan air bersih di Desa Borikamase. Namun demikian, masyarakat juga harus menyadari bahwa persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lokal, baik di tingkat masyarakat, maupun di tingkat pemerintah. Di satu sisi masyarakat mengharapkan bahwa: (1) proses penyampaian informasi terkait kepentingan pelaksanaan program Pamsimas tidak harus dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang bersifat formal yang terkadang membuat masyarakat menjadi segan dan takut/malu menyampaikan pendapat mereka; (2) pelaksanaan rapat pada waktu kerja dihindari karena masyarakat beranggapan “tidak ada uang kalau tidak kerja” dan ini menyebabkan peserta rapat yang hadir hanya dari unsur pemerintah desa; (3) dalam rapat-rapat juga diharapkan menggunakan bahasa bahasa lokal agar masyarakat mudah mengerti apa yang disampaikan dan juga memudahkan untuk menyampaikan pendapat; (4) pendampingan fasilitator harus lebih intens agar terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mereka tidak hanya datang pada saat ada rapat terkait agenda program; (5) politik lokal sebaiknya tidak memberikan dampak yang bisa merusak kepercayaan dan hubungan sosial antar anggota masyarakat serta antar masyarakat dan pemerintah; (6) mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan yang terkait dengan kebutuhan air bersih, baik secara substantif, maupun secara teknis. Misalnya, manfaat biopori dan pembuatan biopori pada setiap titik yang berpotensi terjadi genangan air pada saat musim hujan. Di samping itu, memperbaiki kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat dengan melakukan penanaman pohon yang dapat menyerap dan menampung air bawah tanah pada saat musim hujan, seperti menanam pohon sukun; (7) pemerintah perlu meninjau ulang definisi swadaya masyarakat kelompok sasaran program karena mereka rata-rata orang miskin, namun mereka diwajibkan untuk berswadaya baik dalam bentuk uang tunai (*in-cash*) maupun dalam bentuk tenaga (*in-kind*); (8) pemerintah desa Borikamase perlu memprakarsai lahirnya aturan yang memberikan sanksi terhadap masyarakat yang boros menggunakan air, apakah dengan sanksi denda dalam bentuk materi atau non-materi atau sanksi sosial lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Acknowledgments

Terima kasih kepada masyarakat Desa Borikamase, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah desa dan kepala desa, seluruh stakeholders yang telah memberikan informasi data penelitian.

Conflicts of interest

Peneliti menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar pustaka

- Agranoff, R. dan McGuire, M. (2007). "Inside the Matrix: Integrating the Paradigms of Inter-governmental and Network Management," *International Journal of Public Administration*, 26(12):1401-1422, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1081/PAD-120024403>, diakses tanggal 11 Desember 2020.
- Ansell, C. and Gash, A. (2007). "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research & Theory*, 18(4):543-571, <https://www.semanticscholar.org/paper/Collaborative-Governance-in-Theory-and-Practice-Ansell-Gash/4b69c75f85cc6a2ba7bf4e1e819e17cfaf4a288f>, diakses tanggal 1 Desember 2020.
- Astuti, M. T. dan Rahdriawan, M. (2013). "Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Di Lingkungan Permukiman Kecamatan Mijen, Semarang", *Jurnal Teknik Pembangunan dan Kota*, 2(4):938-947, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/3544>, diakses tanggal 3 Desember 2020.
- Bachtiar. (2016). *Manajemen Kolaborasi Sektor Publik: Studi Dukungan Dalam Pencapaian Overstock Beras Dua Juta Ton Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kodam VII/Wirabuana*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bryson, J. M.; Crosby, Barbara. C.; dan Stone, M.M. (2006). "The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations," *Public Administration Review*, 66(1):44-55, [https://www.scirp.org/\(S\(i43dyn45teexjx455qlt3d2q\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1282968](https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1282968), diakses tanggal 24 November 2020.
- Coleman, J. S. (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital," *American Journal of Sociology*, 94:95-120, <https://www.socialcapitalgateway.org/content/paper/coleman-j-s-1988-social-capital-creation-human-capital-american-journal-sociology-94-s>, diakses tanggal 19 Agustus 2020.
- Donahue J. D dan Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative Governance Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. New York: Princeton University Press.
- Emerson, K.; Nabachi, T.; dan Balogh, S. (2012). "An Integrative Framework for Collaborative Governance", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1):1-29, <https://academic.oup.com/jpart/article/22/1/1/944908>, diakses tanggal 03 Juli 2020.
- Emerson, K. Dan Nabachi, T. (2015). *Collaborative Governance Regime*. George Town: University Press of USA.
- Fitriyani, N. dan Rahdriawan, M. (2015). "Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program Pamsimas di Kecamatan Tembalang", *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(2), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/90/920>, diakses tanggal 20 Januari 2021.

- Insani, S. dan Satlita, L. (2016). *Efektifitas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Temanggung*. Yogyakarta: AN FIS UNY.
- Islamy L.O.S. (2017). *Model Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kholiq, A. (2014). "Evaluasi Keberhasilan Program Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes", *Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil*, 20(2):125-133, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/9254>, diakses tanggal 15 Oktober 2020.
- Nengsi, S. (2018). " Analisis Keberlangsungan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Mei, 4(1):33-42, <https://media.neliti.com/media/publications/283710-analisis-keberlangsungan-program-penyediaan-95378cb4.pdf>, diakses tanggal 15 November 2020.
- Nurjaya, M. (2020). *Colaborative Governance pada Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Maros*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Juknis Pamsimas (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). (2018). Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum.
- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic. Mradition in modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.